

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Praktik Pendidikan Nasional Indonesia tengah menghadapi persoalan yang berkaitan dengan peningkatan mutu di samping tetap menuntaskan aspek pemerataan dan relevansi pendidikan. Untuk memperbaiki hal tersebut, program-program khusus diselenggarakan, terutama dalam rangka menghadapi tuntutan persaingan global yang memerlukan daya saing tinggi. Kondisi ini semakin terasa dengan berkembangnya pendekatan-pendekatan formal yang cenderung semakin kuat dalam mengatasi masalah pendidikan. Pendekatan ekonomi dan teknologi informasi semakin memerlukan partner bukan semata-mata diperlukan sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman, melainkan untuk keseimbangan hidup melalui pendekatan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga pencarian alternatif pemecahan lebih mencapai sasaran.

Esensi pendidikan sejatinya membangun kesadaran individu terhadap hakikat kehidupan. Hakikat hidup manusia tersebut diperoleh dari terbinanya jati diri kemanusiaan secara utuh antara pengembangan pendidikan yang didasarkan pada ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu ekonomi dan teknologi informasi. Kajian terhadap ilmu-ilmu kemanusiaan kalah intensif dibandingkan dengan ilmu ekonomi maupun teknologi, padahal ilmu-ilmu kemanusiaan menduduki tempat sentral dalam proses pembangunan. Sebagian besar penyimpangan dalam pembangunan terjadi karena pengabaian ilmu kemanusiaan (Alwasilah, 2009, hlm. 1).

Fakta dan informasi yang menunjukkan bahwa manusia Indonesia telah mengalami proses dehumanisasi, di antaranya terjadi degradasi nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat yang kian merebak. Beberapa kasus KKN marak terjadi di berbagai lini kehidupan bernegara, tingkat kriminalitas (perkosaan, perampokan, pembunuhan, terorisme, pergaulan bebas, penyalahgunaan obat, *trafficking*) yang tinggi. Selain itu, beberapa kasus berindikasikan SARA yang

berujung pada disintegrasi bangsa menghiasi kehidupan Indonesia sehari-hari. Hal ini tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi bangsa Indonesia sehingga yang menjadi fokus permasalahannya adalah minimnya pengembangan ilmu kemanusiaan di kancah dunia pendidikan.

Survei nasional terbaru menunjukkan sebagian dari 10.000 siswa SMA mengaku pernah mencuri sesuatu di pertokoan, studi terbaru ditemukan bahwa 22% siswa kelas lima SD pernah mabuk dan menggunakan mariyuana. Diagnosis hiperaktivitas dan kesulitan belajar meningkat 700 %, angka bunuh diri remaja meningkat 300 %, dan depresi meningkat 1000 %. Statistik tersebut menegaskan bahwa kekuatan moral yang diperlukan oleh anak-anak untuk menjaga adab mereka dalam menghadapi dekadensi moral yang ada saat ini telah hilang (Borba, 2008, hlm. 11). Angka tersebut menunjukkan jumlah yang sangat drastis dari tahun ke tahun yang disebabkan bertambahnya perilaku negatif yang bermunculan sehingga menjadi dampak yang signifikan terhadap kemajuan bangsa.

Thomas Lickona, seorang professor pendidikan dari Cortland university mengungkapkan ada sepuluh tanda-tanda zaman yang harus diwaspadai, apabila sebuah bangsa telah ada tanda-tanda tersebut berarti bangsa tersebut sedang menuju kehancuran. Tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut (1) Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja (2) Penggunaan kata-kata dan bahasa yang memburuk (3) Pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan (4) Meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkotik, alcohol dan seks bebas (5) Semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk (6) Menurunnya etos kerja (7) Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru (8) Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga Negara (9) Membudayanya ketidakjujuran (10) Adanya rasa saling curiga dan kebencian diantara sesama. Menurut ratna megawangi ke sepuluh tanda tersebut sudah ada di indonesia, salah satunya adalah data POLDA metro jaya tahun 1998 di Jakarta tercatat 230 kasus tawuran (15 meninggal, 34 luka berat dan 108 luka ringan), hasil penelitian di 5 SMK-TI bogor (GMSK-IPB) dengan jumlah sampel 903 siswa menunjukkan bahwa 66,7% terlibat tawuran, 48,7% menggunakan batu, 26% memukul dengan

alat, dan 1,7% memukul dengan senjata tajam, dan merebaknya kata-kata kasar serta buruk (penggunaan bahasa prokem di kalangan remaja)

Krisis identitas manusia modern tersebut disebabkan oleh kemajuan teknologi dan transformasi sosial (Tilaar, 2002, hlm. 34). Pengaruh teknologi informasi telah mengubah tingkah laku modern yang mengikis budaya lokal, seperti merebaknya konsumerisme, budaya massa dan kekerasan, konsentrasi kekuasaan premanisme mulai dari kalangan bawah sampai petinggi negeri, semakin terdiferensiasinya masyarakat yang berlapis-lapis, sebagai bentuk “krisis identitas manusia”.

Keinginan manusia untuk mengglobal dan keinginan untuk kembali mencari identitas diri menjadi polarisasi dua kekuatan yang harus digabungkan. Di satu pihak, nasionalisme yang saat ini sedang dicanangkan dalam membangun masyarakat kewargaan melalui bangunan negara bangsa (*nation state*) akan digerus oleh persatuan global (*global state*). Sementara itu, di lain pihak, orang mulai merasakan bahwa harga diri sebagai budaya kearifan yang dimiliki akan sulit tergantikan begitu saja oleh budaya global. Sejak sepuluh tahun yang lalu, Huntington mengatakan bahwa masa depan bukan lagi dikuasai oleh ikatan-ikatan politik dalam arti negara bangsa (*nation state*), tetapi ikatan-ikatan primordial, seperti agama (*religion*) dan kebudayaan (*culture*) (Huntington, 1991, hlm. 22).

Problematika yang dipaparkan sebelumnya bermuara pada problem ekstrinsik yang terjadi di dunia pendidikan. Selain problem ekstrinsik tersebut terdapat pula problem intrinsik yang berkenaan dengan kurikulum, metodologi, tenaga kependidikan, instrumen pendidikan, problem ekstrinsik berkenaan dengan dampak globalisasi, kepentingan politik, sosial ekonomi, demografi, dan lain-lain. Tentunya memerlukan jawaban konkret komprehensif dalam membangun sistem pendidikan dengan paradigma dan orientasi pendidikan sebagai strategi kultural yang membawa supremasi nilai serta pendidikan pada aspek pragmatis teknis. Dalam hal ini perlu dikembangkan pendidikan dengan kearifan lokal.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pentingnya menyelami pendidikan melalui “etnopedagogik”. Hal tersebut dikarenakan pendidikan modern bukan lagi

penuangan pengetahuan belaka (*pouring*) seperti halnya pada pendidikan di masa lalu, melainkan lebih daripada itu karena merupakan transformasi dimana selain pintar secara nalar juga tidak nihil dari pengembangan sikap dan kepribadian, cerdas otak, sekaligus cerdas watak (Alwasilah, 2009, hlm. 35).

Masalah pendidikan sendiri bukan hanya merupakan permasalahan yang hanya dapat diselesaikan oleh pendidikan formal saja, melainkan harus menjangkau permasalahan yang terkonsentrasi pada pendidikan informal dan nonformal, agar tidak terabaikan satu sama lain karena keseluruhan bidang pendidikan merupakan masalah sosial budaya yang tumbuh dalam latar belakang budaya bangsa. Dalam hal ini, diperlukan kajian yang menempatkan masalah pendidikan sinergis antara pendidikan formal, informal, dan nonformal.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa:

... untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...

Pernyataan tersebut tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengimplementasikan amanat tersebut, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang berfungsi:

... mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Implementasi amanat UUD 1945 tersebut agar mendekati strategi yang tepat, maka esensi pendidikan nasional sebagai fondasi perubahan sosial memerlukan suatu pendekatan yang tidak hanya bersifat politis, melainkan bersifat teknis yang lebih mengarah pada pendekatan secara menyeluruh

mengenai hakikat pendidikan sebagai bagian dari kehidupan bangsa. Dalam visi Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dimana memprogramkan terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional Indonesia yang cerdas dan komprehensif serta bermakna di antaranya cerdas spiritual, emosional, intelektual, dan kinestetis (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendidikan dapat menggunakan pendekatan berbasis budaya. Cara yang dapat ditempuh yaitu melalui pendidikan formal di sekolah yang harus menitikberatkan pendewasaan peserta didik berdasarkan lingkungan budaya. Untuk memperkenalkan peserta didik pada lingkungan budaya, sekolah dapat menempuhnya dengan melakukan kajian-kajian/penelitian-penelitian berbasis lingkungan budaya untuk menemukan transformasi nilai-nilai tradisi karakter “etnis” sebagai fondasi membangun nasionalisme secara *bottom up*. Pendekatan pendidikan ini yaitu etnopedagogik yang mana etnopedagogik merupakan wahana untuk mengungkap permasalahan kependidikan yang saat ini lebih berbasis budaya barat menuju pendekatan pendidikan yang berbasis kebudayaan lokal.

Realitas menunjukkan, dalam modernisasi pendidikan di Indonesia saat ini masih bercermin pada buku dan penelitian masyarakat yang berkebudayaan Barat. Maraknya perkembangan etnonasionalisme serta perlunya mengembangkan identitas bangsa Indonesia, maka ilmu pendidikan yang berorientasi kepada kebudayaan Indonesia yang beragam merupakan suatu kebutuhan mendesak (Tilaar, 2002, hlm. 93). Hendaknya melalui kajian atau penelitian-penelitian yang berbasis etnopedagogik diharapkan terbina generasi penerus yang diangkat dari akar budaya sendiri sebagai masukan dalam upaya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan meliputi (1) “*civic knowledge*”, (2) “*civic disposition*”, dan (3) “*civic skill*”.

Etnopedagogik sebagai jalan bijak menuju revitalisasi pendidikan di mana lembaga pendidikan bukan hanya sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai pusat penghayatan dan pengembangan budaya baik budaya lokal, nasional, maupun budaya global (Alwasilah, 2009, hlm. 53). Dengan demikian, pengembangan budaya lokal kepada peserta didik sangat diperlukan sehingga

mereka dapat menghayati budayanya dan dirinya sendiri. Dalam hal ini, sekolah sebagai lembaga pendidikan sangat strategis dijadikan sebagai pusat budaya yang menjadi wahana pusat budaya, sebagai agen pembaharu (*agent of change*) untuk memproduksi nilai-nilai budaya kearifan lokal sebagai modal sosial (*social capital*) masyarakat Indonesia yang dinamis (Tilaar, 2002, hlm. 53).

Kebudayaan yang berubah terus menerus, dengan sendirinya akan menyebabkan ilmu pendidikan dengan kebudayaan sebagai fondasinya berpengaruh terhadap praktik pendidikan dalam upaya mengembangkan sikap toleransi masyarakat demokrasi yang cenderung melahirkan etnonasionalisme. Model pendidikan yang potensial mengembangkan kohesi sosial yaitu sebagai berikut:

1. Model pendidikan inter-kultural. Model ini menekankan kepada eksistensi budaya-budaya atau sub-sub budaya yang ada. Dalam rangka pengembangan kohesi sosial, maka yang diperlukan ialah kegiatan interaksi budaya.
2. Model pendidikan trans-kultural. Model ini mencari bentuk-bentuk universalitas dari budaya-budaya yang ada. Model ini telah diterapkan pada masa orde baru.
3. Model pendidikan multikultural. Model ini populer di masa reformasi, menekankan pada keragaman budaya di mana setiap budaya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang dan dipelihara (Tilaar, 2002, hlm. 23).

Bagi masyarakat Indonesia yang sedang mencanangkan otonomi daerah, model pendidikan berbasis budaya etnik yang ada di dalam masyarakat diupayakan untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang. Masyarakat Indonesia yang majemuk memiliki kewenangan untuk sepenuhnya mengembangkan pendidikan berbasis budaya yang dimilikinya sesuai praktik yang dijadikan pandangan hidupnya. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi untuk mengkoordinasikan agar tidak terjadi benturan antar budaya. Benturan tersebut dapat diminimalisasi melalui jalur pendidikan. Dengan demikian, pendidikan di daerah harus tumbuh dan berkembang dalam konteks budaya di mana lembaga pendidikan itu berada. Diintegrasikannya pengetahuan budaya lokal bagi pendidik yang dipersiapkan oleh LPTK adalah untuk mengantisipasi eksese sukuisme, agar rekrutmen pendidik di daerah dapat mengembangkan sistem lisensi tenaga guru

di daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk menambah kriteria sendiri yang cocok bagi perkembangan pendidikan di daerahnya (Strauss, 2000, hlm. 56).

Solusi Kemendiknas yang saat ini sedang digulirkan berkenaan dengan pendidikan karakter diharapkan mampu mengatasi keterpurukan bangsa yang sedang terjadi baik di lingkup kapasitas pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, baik dalam lingkup pendidikan informal, formal, maupun nonformal. Oleh karena itu, sekolah sebagai satuan pendidikan tingkat dasar dan sebagai organisasi praktis pendidikan perlu nilai menjadikan diri sebagai sarana bukan hanya sebagai pembina karakter di lingkup intern sekolah saja, tetapi perlu mengintegrasikan nilai-nilai budaya lingkungan di mana sekolah berada dengan melibatkan peran serta orang tua, dunia kerja, dunia industri, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga penelitian.

Aplikasi pendidikan berbasis budaya (etnopedagogik) relevan dengan pengembangan pendidikan karakter bangsa yang sedang dicanangkan karena berkaitan dengan proses humanisasi dalam praktis pendidikan, di mana proses humanisasi tidak berlangsung tanpa kebudayaan. Humanis Indonesia yang dikembangkan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai filsafat manusia Indonesia karena Pancasila digali dari kebudayaan Indonesia.

Rasa percaya para anggota masyarakat budaya dalam menerapkan nilai-nilai budaya lokal yang terdapat dalam lembaga sosial dimana merupakan alat perekat secara "*bottom up*", sedangkan Pancasila sebagai alat pemersatu karakter bangsa merupakan alat perekat secara "*top down*". Dua kekuatan alat pemersatu bangsa ini akan saling memperkuat dan memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika yang disemboyankan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga yang diutamakan ketunggalan lebih bersifat "*top down*", akan tetapi ke-tunggal ika-an yang didukung oleh keanekaragaman budaya kearifan lokal bersifat "*bottom up*". Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan yang cenderung mengajarkan indoktrinasi di masa lalu lebih memelihara nilai-nilai karakter bangsa (Pancasila) secara "*top down*" melalui upaya pengembangan pendidikan karakter bangsa yang berbasis budaya kearifan lokal (etnopedagogik) dapat dibangun secara *bottom up*.

Dengan kata lain, Pendidikan Kewarganegaraan dibangun melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal dalam bingkai Indonesia.

Sebagai bahan perenungan, dapat dianalisis secara umum di dunia bahwa Amerika dan negara-negara belahan dunia utara menjadi negara maju karena *front row spirit*-nya, Jepang menjadi negara *super power* dalam bidang ekonomi karena *busidho* nya, Korea maju menjadi salah satu negara adidaya ekonomi dunia karena skema *saemaul undong movement*-nya, Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan karena *Konfusianisme*-nya, Malaysia mulai merangkak menjadi negara maju karena *progressive mind* nya atau *truly Asia* nya. Dengan kata lain, sebuah negara bisa tumbuh secara signifikan apabila bertumpu pada “*spiritualitas*” berbasis budaya (Tim Pemerintah Kota Bandung, 2009). Pendidikan baik di tingkat persekolahan maupun perguruan tinggi harus mampu melahirkan anggota masyarakat yang memiliki pandangan yang luas tentang nilai-nilai kebudayaannya sendiri sebagai subbudaya dari masyarakat Indonesia yang beranekaragam.

Pada tingkat persekolahan, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk pengembangan karakter bangsa. Pancasila sebagai soko utama pendidikan politik kenegaraan dan hukum merupakan substansi yang dijadikan standar isi dalam penyusunan kurikulum. Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa yaitu berupaya mencanangkan tidak hanya dari sisi kecerdasan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang akan dibinakan pada peserta didik, tetapi juga tanggung jawab kewarganegaraan (*civic disposition*) dan keterampilan serta partisipasi kewarganegaraan (*civic skill*) dalam membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, yang memiliki cinta tanah air dan bangsanya, tidak hanya tahu dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, tetapi mampu memanfaatkan hak dan kewajibannya tersebut secara proporsional, sehat, wajar dan halal untuk kepentingan dirinya dan orang banyak.

Aliran behavioristik konvensional yang selama ini dikembangkan perlu diimbangi oleh model pendekatan pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal (etnopedagogik) agar masalah-masalah sosial yang muncul selama ini yang

mengakibatkan terjadinya disintegrasi akan terjawab. Melalui pendekatan belajar revolusi *sociocultural* yang dikembangkan Vygotsky (1983, hlm. 134) didasarkan pada pandangan bahwa peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang terutama berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya, bukan sekadar dari individu itu sendiri. Teori Vygotsky disebut juga pendekatan *co-konstruktivisme*.

Vygotsky mengaitkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran, anak hendaknya memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proximalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang (Budiningsih, 2005, hlm. 107). Guru perlu menyediakan bantuan dalam kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya (*helps/cognitive scaffolding*) misalnya melalui bentuk contoh, pedoman, bimbingan orang lain atau teman yang lebih berkompotensi. Bentuk pembelajaran kooperatif-kolaboratif serta pembelajaran kontekstual sangat tepat, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat terhadap karakteristik siswa dan budaya di mana siswa belajar dari lingkungan budaya masyarakat di mana mereka belajar.

Jawa Barat identik dengan lingkungan etnis “Sunda”. Sebagaimana etnis-etnis lain di lingkungan sosial budaya yang mewarnai karakteristik budaya-budaya sekolah yang ada di wilayah Jawa Barat. Pandangan hidup orang Sunda dari masa lalu hingga saat ini tentu merupakan pegangan hidup yang seyogyanya masih tercermin dalam tutur kata dan perbuatan sebagai karakter sosial yang akan memperkokoh karakter bangsa berlandaskan Pancasila. Karakter bangsa Pancasila merupakan kristalisasi dari karakter sosial dari setiap etnis yang ada di Indonesia yang menjadi masyarakat pendukungnya. Adapun karakter individu seyogyanya berbasis pada tradisi leluhur yang secara turun temurun ditransformasikan melalui pendidikan yang berbasis budaya (etnopedagogik). Definisi budaya Sunda menurut ketentuan umum Peraturan Bupati No. 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) adalah keseluruhan gagasan, perilaku dari hasil karya masyarakat Sunda, baik yang berupa fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya, yang diyakini dapat memenuhi harapan dan kebutuhan hidup masyarakat Sunda.

Penjelasan tentang tradisi lisan Sunda mencerminkan nilai-nilai moral yang biasa dilakukan orang tua terdahulu pada masyarakat Sunda untuk membina karakter anak-anaknya agar perilaku dalam hidupnya senantiasa berakhlak mulia. Tradisi lisan Sunda sebagai salah satu bentuk kecerdasan sosial pendidik di masyarakat Sunda berbasis karakter (budaya) menanamkan nilai-nilai karakter berdasarkan 18 karakter yang diusung Kementerian Pendidikan Nasional seperti (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab (Kemendiknas, 2010).

Rumusan umum mengenai “*Civic knowledge*” atau “*Civic Intellegency*” dalam *Massachussets Institute of Technology Encyclopedia of Cognitive Sciences*” didefinisikan sebagai intelegensi atau kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri, memilih dan mengembangkan lingkungannya, dimana intelegensi berkenaan dengan tiga kemampuan yaitu: (1) adaptasi, (2) konstruktif dan (3) selektif (Tilaar, 2002, hlm. 448). Tanpa lingkungan, budaya, dan alam, maka manusia tidak bisa berkembang. Manusia beradaptasi lalu mengkonstruksi dan menseleksi lingkungan yang diinginkannya. Sebagai makhluk berbudaya dan membentuk masyarakat budaya. Intelegensi manusia hanya mempunyai arti di dalam lingkungan budayanya. Melepaskan manusia dari lingkungan budaya nyata berarti mencabut manusia dari kehidupan nyatanya. *Civic intelligence/ civic knowledge* dirumuskan sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, serta mentransformasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut bersumber dari moral dan etika yang transendental. Oleh karena itu, *civic knowledge* merupakan kemampuan rasional, emosional, dan spiritual seorang warga masyarakat yang berbudaya.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia dan mampu mentransformasikan nilai-nilai karakter bangsa yang di masa orde baru telah gagal total karena hanya tertumpu

pada pendidikan indoktrinasi berbentuk ideologi Pancasila. Hal ini disebabkan, terjadinya peniadaan tempat bagi diskursus atau kebebasan interpretasi (Tilaar, 2002, hlm. 452). Pendidikan yang digunakan lebih menekankan pada pendekatan intelektual dengan asumsi nilai-nilai dapat dihapus yang diharapkan dapat diwujudkan dalam tingkah laku, namun kenyataannya dalam praktek mewujudkan apa yang diketahui tidak diwujudkan dalam perbuatan. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru ini perlu membelajarkan peserta didik dengan pendekatan ciri intelegensi taraf tinggi yang mengutamakan proses "*learning by doing*" dan "*learning by experience*". Peserta didik melakoni semua nilai-nilai yang dipelajarinya di sekolah dari masyarakat, di masyarakat, dan untuk masyarakat melalui kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, atau ko-kurikuler secara kolaboratif antar bidang studi berbasis budaya dan karakter bangsa dalam lingkup masyarakat daerah di mana sekolah berada.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter pun mengandung misi tujuan nasional merupakan mata pelajaran wajib di tingkat persekolahan. Kerangka sistematis Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dibangun atas dasar paradigma baru sebagai berikut :

1. Secara kurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.
2. Secara teoretis memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor (*civic knowledge, civic disposition, dan civic skill*) atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara.
3. Secara programatis menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tumpuan hidup bagi warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara (Budimansyah, 2008, hlm. 180).

Realitas sosial yang berkenaan dengan perubahan kehidupan masyarakat dewasa ini, marak dengan berbagai permasalahan sosial seperti ancaman disintegrasi yang disebabkan oleh fanatisme dan primordialisme di satu sisi dan tuntutan pluralisme di sisi lain menyebabkan PKn sebagai pendidikan karakter di

tingkat persekolahan secara programatik perlu mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*). Perubahan struktur dan luntarnya nilai-nilai kekeluargaan, sikap gotong royong, serta merebaknya kejahatan, munculnya organisasi-organisasi dan geng-geng seperti geng motor, kelompok-kelompok solidaritas yang menyimpang diantara pelajar, yang disebabkan oleh lemahnya *social capital* (modal sosial) mendorong pakar-pakar pendidikan di tingkat akademisi, birokrasi dan praktisi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk mengkaji ulang paradigma pendidikan dan pembelajaran yang menjadi acuan selama ini.

Permasalahan-permasalahan sosial saat ini walaupun sepenuhnya bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi kontribusi untuk membangun sumber daya manusia sebagai *social capital* sangat besar dan pendidikan seharusnya menjadi panglima. Kenyataan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan pada penelitian yang berjudul “Model Habitiasi Pendidikan Karakter Berbasis Etnopedagogik”.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Merujuk latar belakang masalah di atas, ternyata banyak faktor yang mempengaruhi permasalahan sosial budaya khususnya di persekolahan. Rendahnya muatan nilai-nilai budaya lokal setempat yang dijadikan emban misi setiap sekolah meyakinkan bahwa melalui etnopedagogik mampu mengembangkan karakter siswa. Terlebih melalui etnopedagogik diasumsikan dapat mengembangkan identitas kedaerahan (*local genius*) tanpa mengindahkan sikap nasionalisme bangsa. Pembaharuan pendidikan karakter melalui pendekatan etnopedagogik merupakan wahana penting dalam mereformasi pembelajaran yang bersifat konvensional menjadi pembelajaran yang efektif, menyenangkan dan bermakna.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas identifikasi permasalahan penelitian ini difokuskan pada pengembangan model pendidikan karakter berbasis etnopedagogik yang dapat memberikan dampak terhadap

pembentukan karakter siswa khususnya dalam pembelajaran PKn di persekolahan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Secara umum permasalahan penelitian ini dirumuskan: “Bagaimana pengembangan pendidikan karakter berbasis etnopedagogik sebagai model habituasi tradisi lisan Sunda di dua lingkungan sistem budaya sekolah di Jawa Barat, berpengaruh terhadap pengembangan karakter siswa”. Agar masalah penelitian ini lebih terinci, maka dijabarkanlah ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana model pengintegrasian tradisi lisan Sunda yang ada di lingkungan masyarakat dimana sekolah berada terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan?
2. Bagaimana merancang RPP model pendidikan karakter berbasis etnopedagogik yang dikembangkan guru-guru di sekolah?
3. Bagaimana pengajaran kolaboratif (*colaborative teaching*) yang dilakukan guru dalam mengintegrasikan tradisi lisan Sunda dengan bidang studi yang relevan di lingkungan sekolah?
4. Bagaimana penerapan model pendidikan karakter berbasis etnopedagogik tradisi lisan Sunda pada dua budaya sekolah di Jawa Barat?
5. Bagaimana dampak pengembangan model pendidikan karakter berbasis etnopedagogik terhadap pembentukan karakter siswa?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menggambarkan desain model pengintegrasian nilai-nilai tradisi lisan Sunda dalam pembelajaran PKBET untuk pengembangan kompetensi kewarganegaraan

2. Merancang secara dokumentasi Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan guru-guru di sekolah uji coba model.
3. Menggambarkan pengajaran kolaboratif (*colaborative teaching*) yang dilakukan guru dalam mengintegrasikan tradisi lisan Sunda dengan bidang studi yang relevan di lingkungan sekolah.
4. Menggambarkan implementasi model pendidikan karakter berbasis etnopedagogik tradisi lisan Sunda yang diterapkan di lingkungan sistem budaya sekolah di Jawa Barat.
5. Mengetahui dampak penggunaan pendidikan karakter berbasis etnopedagogik terhadap pembentukan karakter siswa.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Signifikansi secara teoretis melalui penelitian ini akan memberikan sumbangan yang nantinya akan:

1. Menghasilkan suatu model pengembangan pendidikan karakter yang dibangun atas dasar nilai-nilai tradisi budaya kearifan lokal, dan tradisi masyarakat di mana sekolah berada.
2. Memperkuat gagasan UPI sebagai LPTK tentang “etnopedagogik“ yang akan menunjang tujuan pendidikan nasional yang berjati diri Indonesia serta berakar pada nilai-nilai agama, dan kebudayaan nasional yang berbasis kearifan lokal dan tanggap terhadap tuntutan zaman.
3. Penguatan secara konseptual-teoretis tentang perencanaan pembelajaran PKn di sekolah sebagai salah satu pilar dalam pendidikan karakter bangsa.

Signifikansi secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat:

1. Membantu setiap satuan pendidikan (sekolah) dalam memberikan makna lebih dan memanfaatkan peluang mata pelajaran muatan lokal yang berbasis tradisi lisan Sunda yang ada di lingkungan sekolah berada.
2. Pendekatan model ini dapat digunakan pada budaya–budaya lokal di daerah lain di sekolah-sekolah Indonesia, sehingga generasi muda Indonesia tidak kehilangan jati diri bangsa dalam berkiprah di era global.

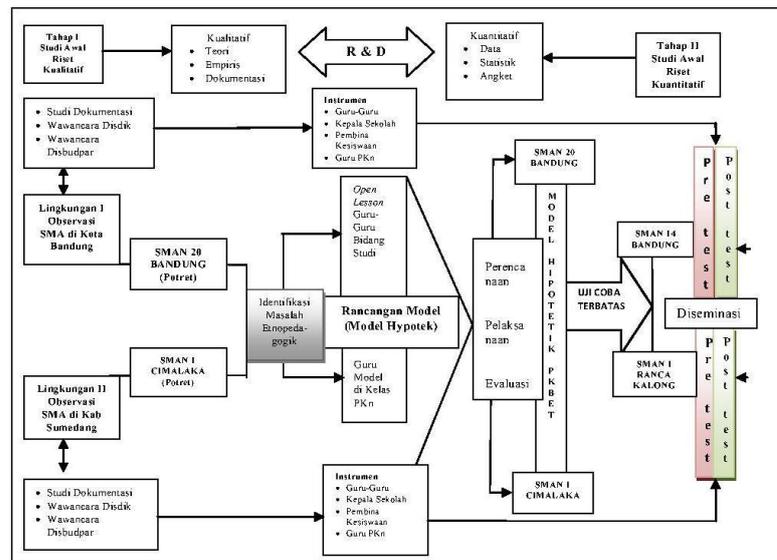
3. Model pengembangan yang adaptif, inovatif, dan *skillfull* berbasis tradisi budaya di mana peserta didik berada diharapkan mampu mendukung sikap “pro-sosial“ mereka sehingga sikap agresivitas yang menjadi ciri remaja saat ini yang mengarah pada dekadensi moral dapat tersalurkan secara positif.

F. Struktur Organisasi Disertasi

Untuk perolehan gambaran disertasi ini, penulis memberikan struktur organisasi penelitian secara sistematis sehingga memudahkan pembaca dalam memahami disertasi ini. Penelitian ini terdiri atas lima bab, di antaranya: (1) bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, struktur organisasi disertasi, paradigma penelitian, serta lokasi dan sasaran penelitian; (2) bab dua berupa kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian; (3) bab tiga meliputi lokasi penelitian, pendekatan dan metode penelitian, definisi konseptual dan operasional, prosedur penelitian, instrumen penelitian, variabel dan fokus penelitian, dan teknik analisis data; (4) bab empat mencakup deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, dan (5) bab lima meliputi kesimpulan, implikasi, rekomendasi dan dalil-dalil.

G. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian diambil berdasarkan dua tahap pendekatan di antaranya riset kualitatif dan riset kuantitatif dengan metode *Research and Development* (R&D) yang dapat digambarkan dalam pola sebagai berikut :



Gambar 1.1
Paradigma Penelitian *Research and Development* (R&D)
Model Pendidikan Karakter Berbasis Etnopedagogik (PKBET)

Pola pada gambar 1.1 mendeskripsikan bahwa secara operasional penelitian ini menekankan pada dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif sebagai bagian dari sistematika penelitian pengembangan (*Research and Development*). Pada studi riset kualitatif memerlukan data-data seperti teori empiris dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan pada dua lingkungan sekolah yang berbeda dimana dijadikan sebagai objek penelitian produk awal yaitu SMAN 20 Bandung dan SMAN 1 Cimalaka. Peneliti melakukan observasi awal dan mengidentifikasi masalah pembelajaran di kelas kemudian diikuti merancang model hypotek untuk menghasilkan perencanaan implementasi model. Setelah dilakukan observasi kemudian dilanjutkan pada tahap implementasi ditinjau berdasarkan tiga komponen pembelajaran yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kemudian, setelah melaksanakan uji implementasi produk awal, dilakukan revisi terhadap model tersebut yang nantinya akan digunakan pada uji coba terbatas di dua lingkungan sekolah yang berbeda pula yaitu SMAN 14 Bandung dan SMAN 1 Rancakalong. Pada uji coba terbatas digunakan studi riset kuantitatif dengan mengadakan eksperimen terhadap dua perlakuan ujicoba melalui evaluasi *pre test* dan *post test*. Rancangan model revisi untuk uji coba terbatas dilengkapi dengan

adanya (1) reportase, (2) pembuatan pamflet, dan (3) bermain peran (*role playing*) sehingga menghasilkan diseminasi penelitian.